



ANALISIS PERAN INFORMASI AKUNTANSI DALAM SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

ANALYSIS OF THE ROLE OF ACCOUNTING INFORMATION IN THE MANAGEMENT CONTROL SYSTEM OF MICROFINANCE INSTITUTIONS

Dwi Mutia Amiati¹, Elin Erlina Sasanti², Adhitya Bayu Suryantara³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

^{1,2,3} Jalan Majapahit No. 62 Mataram

dwimutiaami@gmail.com¹, elinerlina@unram.ac.id², adhityabayus@unram.ac.id³

Sejarah Artikel: Diterima April 2023, Disetujui Mei 2023, Dipublikasikan Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran informasi akuntansi dalam sistem pengendalian manajemen sebuah organisasi yakni lembaga keuangan mikro. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui peran informasi akuntansi sebagai landasan dalam sistem pengendalian manajemen yang terjadi pada sebuah organisasi yakni LKM BUMDes Bina Sejahtera. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni memberikan gambaran sistematis tentang peran informasi akuntansi dalam sistem pengendalian manajemen LKM Bina Sejahtera. Teknik analisis data yang digunakan yakni dengan penjelasan yang ditulis secara naratif berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen dan penggunaan informasi akuntansi pada LKM Bina Sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKM Bina Sejahtera menjalankan sistem pengendalian manajemen dengan baik meskipun belum sempurna serta penggunaan informasi akuntansi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta evaluasi.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Mikro, Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Manajemen

ABSTRACT

This study aims to determine the role of accounting information in the management control system that occurs in an organization, namely the LKM BUMDes Bina Sejahtera. The research approach used is descriptive qualitative, which provides a systematic description of the role of accounting information in the management control system of LKM Bina Sejahtera. The data analysis technique used is an explanation written in a narrative related to the management control system and the use of accounting information at the LKM Bina Sejahtera. The results showed that the LKM of Bina Sejahtera had a sound management control system, although not perfect, and use of accounting information as a basis for decision-making and evaluation.

Keywords: Microfinance Institutions, Accounting Information, Management Control System

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai daerah yang otonom, desa berhak mendapatkan sumber pendapatan. Sumber pendapatan desa tersebut merupakan kekayaan desa. Tentunya pengelolaan kekayaan milik desa harus dilaksanakan berlandaskan asas kepentingan

umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Hal ini ditujukan agar pengelolaan kekayaan desa menjadi sarana mewujudkan pembangunan desa.

Desa membutuhkan lembaga yang dapat merangkul seluruh potensi serta kearifan lokal desa untuk mengelola kekayaan desa dan menghidupkan perekonomian desa. Lembaga yang dapat menjadi wadah dan memfasilitasi setiap warga desa untuk dapat memberikan kerja keras dan buah pikiran. Lembaga yang sesuai bagi masyarakat desa ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisah guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Rudini et al., 2014). BUMDes memiliki peranan sebagai instrumen otonomi desa untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa (Shifa & Ilyas, 2021).

Seiring berjalannya waktu, peran BUMDes dalam mendukung pengembangan potensi dan perekonomian desa dirasa semakin penting. Hal tersebut akhirnya mendorong berbagai desa di Indonesia untuk berlomba-lomba mendirikan BUMDes sebagai sarana pengembangan ekonomi desa. Hingga tahun 2021 tercatat sudah berdiri 57.273 unit BUMDes di Indonesia (Waseso, 2021). Salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Sejahtera yang merupakan badan usaha milik Desa Kembang Kerang yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2015 dengan tujuan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat Desa Kembang Kerang itu sendiri. BUMDes Bina Sejahtera memiliki beberapa unit usaha salah satunya adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga keuangan yang beroperasi untuk pengembangan usaha khususnya dalam skala kecil atau mikro dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat dan anggota, pengelolaan simpanan, serta memberikan konsultasi terkait usaha, dalam hal ini konsultasi dilakukan untuk

tidak mencari keuntungan (Ojk.go.id, 2017). Terdapat banyak kebocoran dana desa yang terjadi di LKM disebabkan karena kurangnya pengendalian manajemen, seperti sistem bagi hasil yang tidak jelas, kreditur yang tidak mengembalikan pinjaman, syarat pemberian pinjaman tidak berdasarkan aturan, nepotisme, serta abainya pengelola LKM terhadap keberlanjutan LKM.

Kasus yang terjadi pada PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas, Kabupaten Serang, dapat menjadi contoh nyata masalah yang menghinggapi LKM. PT Lembaga Keuangan Mikro Ciomas memiliki permasalahan terkait dengan kredit macet yang setelah dihitung mencapai nilai Rp 3 Milyar. Masalah tersebut timbul dari para nasabah PT LKM Ciomas. Para nasabah ini telah menunggak membayar cicilan pinjaman kredit di PT LKM Ciomas. Kebanyakan dari para nasabah PT LKM Ciomas adalah para Kepala Desa. Pihak manajemen kesulitan untuk memotong pinjaman para mantan Kepala Desa yang telah habis masa kerjanya. Alasan para mantan Kepala Desa tidak membayar pinjamannya dikarenakan mereka telah habis masa baktinya sebagai Kepala Desa (Serangkab.go.id, 2021).

Kasus lainnya juga terjadi pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun Mandiri Desa Giripeni, Kecamatan Wates. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kulonprogo, pengelola LKM disinyalir menggunakan dana sebesar Rp 147 juta tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan dananya. Selain itu, ditemukan beberapa kasus kredit macet senilai Rp 257 Juta serta data nasabah yang tidak valid. Kepala Desa Giripeni, Priyanti juga membenarkan adanya permasalahan keuangan di LKM Binangun Mandiri. Permasalahan tersebut menyebabkan sejumlah warga setempat kesulitan untuk mencairkan pinjaman (Harian Jogja, 2018).

Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan operasional Lembaga Keuangan Mikro tidak lepas dari praktik akuntansi karena didalamnya ada perputaran uang (*cashflow*) dari transaksi-transaksi baik melalui simpanan atau pinjaman (Pradana, 2019). Ini berarti bahwa informasi akuntansi pada sebuah organisasi memiliki peran yang penting dan sangat berpengaruh dalam kegiatan organisasinya. Penggunaan informasi akuntansi dalam sistem pengendalian manajemen suatu organisasi memainkan satu

peranan yang sangat penting. Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan-keputusan dalam pengelolaan usaha kecil. Informasi akuntansi mempunyai kemampuan untuk memperjelas masalah yang dihadapi oleh manajemen (Mastura et al., 2019). Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan berasal dari informasi intern dan ekstern. Dimana masing-masing informasi bisa berbentuk *financial* maupun *non financial* (Putri et al., 2017). Pengambilan keputusan yang tepat dapat menentukan keberhasilan dari sebuah usaha. Oleh karena itu, informasi akuntansi memiliki peran yang penting bagi organisasi dan pelaku bisnis dalam mencapai keberhasilan usahanya.

Mewujudkan keberhasilan usaha membutuhkan kesesuaian antara kepentingan individu dan kepentingan organisasi yang dapat dicapai melalui sistem pengendalian manajemen. Sistem Pengendalian Manajemen merupakan prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk mempertahankan atau mengubah pola dalam aktivitas organisasi. Sistem pengendalian manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yaitu berkaitan dengan bagaimana manajer dapat secara aktual menggunakan perencanaan dan sistem pengendalian untuk memandunya dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Uhise, 2013). Tujuan dari Sistem pengendalian manajemen adalah untuk memudahkan manajemen dalam mendapatkan informasi yang tepat, cepat, dan dapat dipercaya bagi pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi bagi perusahaan (Prasetio et al., 2020). Sistem pengendalian manajemen yang paling mungkin dalam organisasi adalah pengendalian berbasis akuntansi karena informasi yang dihasilkan lebih terukur dan dapat diperbandingkan. Selain itu informasi akuntansi juga mencerminkan kondisi terkini keadaan organisasi terutama pada masalah keuangannya sehingga dapat membantu organisasi, pada tahap yang sangat minimal, setidaknya dalam pengendalian biaya (Suryantara et al., 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Mastura et al., (2019), Rianto & Hidayatulloh (2020), Nettiary (2020), dan Amalia (2021) mengemukakan bahwa dengan adanya penggunaan informasi akuntansi dapat meningkatkan keberhasilan usaha (UMKM) karena dengan informasi akuntansi tersebut para pelaku usaha dapat memonitoring usaha

mereka sehingga mereka mengetahui usahanya berkembang atau tidak serta dengan adanya informasi akuntansi tersebut pelaku usaha (UMKM) dapat menggunakannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis yang sangat bermanfaat dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi usaha. Uhise (2013) mengemukakan bahwa unsur informasi dan komunikasi serta pemantauan berjalan dengan baik karena adanya sistem yang terintegrasi dengan baik. Hal ini menunjukkan hubungan antara informasi khususnya informasi akuntansi dengan sistem pengendalian manajemen dalam suatu organisasi sangat erat.

Namun, kajian Suryantara et al., (2017) dan Mulyani (2018) mengemukakan perusahaan/organisasi yang diteliti menganggap bahwa informasi akuntansi tidak begitu penting dan hanya dimaknai sebatas laporan keuangan dengan tujuan untuk memenuhi peraturan yang berlaku. Informasi akuntansi tersebut tidak dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak internal untuk mengevaluasi hasil keseluruhan kinerja mereka. Hal tersebut menyebabkan informasi akuntansi terisolasi dari lingkungan pengendalian manajemen dimana anggaran serta program yang telah dibuat tidak dijadikan target dalam mengembangkan perusahaan/organisasi melainkan hanya menjadi program yang akan dilaksanakan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BUMDes Bina Sejahtera merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Keuangan Mikro BUMDes Bina Sejahtera tepatnya di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan 3 informan yakni ketua BUMDes, bendahara BUMDes, manajer LKM. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan, dokumen penyaluran anggaran, daftar kredit nasabah, peraturan tentang LKM khususnya

tentang penyaluran kredit, dan hal-hal yang dapat memperkuat hasil penelitian. Tahapan dalam analisis data yakni dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan informan, mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian, dan observasi lapangan yang dapat memperkuat bukti penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dirangkum dengan mengambil poin-poin yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data disajikan dengan memberikan gambaran serta penjelasan yang ditulis naratif berkaitan dengan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bina Sejahtera merupakan lembaga yang bergerak dalam usaha simpan pinjam sejak tahun 2015 hingga saat ini. LKM Bina Sejahtera didirikan dengan tujuan untuk perputaran perekonomian khususnya dalam segi permodalan agar dapat membantu memberikan modal usaha kepada UMKM yang ada di Desa Kembang Kerang serta untuk menghimpun permodalan dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Target dan sasaran dari LKM Bina Sejahtera yaitu kesejahteraan masyarakat Desa Kembang Kerang. Peran serta tugas dari LKM Bina Sejahtera yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan dan permodalan. Modal awal LKM yang diterima dari desa berjumlah Rp 25 juta. Dana pertahun yang diterima oleh BUMDes khususnya LKM berasal dari dana desa dengan mekanisme pengajuan proposal penambahan modal yang dibuat oleh pihak BUMDes. Besar anggaran yang diterima oleh BUMDes khususnya LKM ditentukan oleh desa. Modal dari desa tersebut digunakan oleh LKM untuk penyaluran kredit kepada nasabah/masyarakat desa.

LKM Bina Sejahtera pada awalnya bergerak secara konvensional dari tahun 2015 sampai awal tahun 2019 dengan menetapkan bunga sebesar 3%. Dalam perjalanannya LKM tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dikarenakan banyak nasabah yang melakukan tunggakan pembayaran setiap bulannya. Hal tersebut menyebabkan LKM Bina Sejahtera mengalami kredit macet sampai sebesar Rp 30 juta dengan jumlah nasabah yang menunggak sebanyak 38 orang.

peran informasi akuntansi dalam sistem pengendalian manajemen Lembaga Keuangan Mikro BUMDes Bina Sejahtera. Data disajikan dengan melakukan triangulasi antara hasil wawancara yang telah dirangkum dengan dokumen yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Penarikan kesimpulan ini berdasarkan pada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pada tahun 2020 LKM Bina Sejahtera melakukan perubahan dari konvensional menjadi syariah. Perubahan sistem yang tadinya dengan bunga berubah menjadi sistem bagi hasil serta memberikan masyarakat atau nasabah melakukan penanaman modal ke BUMDes dimana keuntungannya kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Penanaman modal ini dilakukan dalam bentuk tabungan dengan ketentuan pemilik modal/penabung mendapatkan 40% dan 60% untuk lembaga dari keuntungan bersih yang dijalankan LKM Bina Sejahtera. Adapun tujuan dari perubahan sistem ini sendiri yaitu untuk memberikan edukasi tentang keuangan syariah kepada masyarakat, meningkatkan perekonomian, menghimpun dan menyalurkan dana dalam upaya menumbuhkan produktivitas masyarakat, dan mendorong pelaksanaan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam.

Perbedaan yang dirasakan oleh LKM setelah mengubah sistem dari bunga ke bagi hasil yaitu masyarakat lebih menerima program-program yang dijalankan LKM serta tertarik dengan program tersebut. Sistem bagi hasil tersebut membawa dampak positif bagi LKM dimana minat masyarakat terhadap program yang dijalankan LKM meningkat. Pemberian kredit yang dilakukan LKM tanpa agunan karena LKM Bina Sejahtera menerapkan sistem kekeluargaan yang diharapkan dapat membangun kedekatan antara masyarakat desa dengan LKM sehingga timbul rasa saling percaya satu sama lain dengan masyarakat. Perhitungan dalam pembiayaan kredit yakni menggunakan margin/keuntungan sebesar 20% dari modal pembiayaan yang disalurkan.

Program yang dijalankan oleh LKM Bina Sejahtera dengan menggunakan sistem bagi hasil lebih membantu LKM untuk berkembang, meskipun tidak bisa menjamin keuntungan

100% namun rasa saling percaya antara LKM dan masyarakat bisa terbangun sehingga dapat membawa LKM lebih eksis dikalangan masyarakat. Dengan begitu LKM Bina Sejahtera tetap bisa berjalan dan berkembang dan program yang disusun dapat dipercaya serta diterima oleh masyarakat.

1. Sistem Pengendalian Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Bina Sejahtera

a. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan langkah sebuah organisasi dalam menentukan arahan/strategi untuk mencapai tujuan organisasinya. LKM Bina Sejahtera sendiri memiliki tujuan yakni untuk perputaran perekonomian yang ada di Desa Kembang Kerang sehingga LKM sendiri memiliki perencanaan strategis yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasinya. Untuk mencapai tujuan tersebut LKM Bina Sejahtera menyusun beberapa program kerja. Program tersebut disusun melalui rapat bersama antara pihak LKM dengan BUMDes. Dasar dari penyusunan program tersebut yakni untuk meningkatkan perekonomian dengan melihat kondisi pasar yang ada di desa. Hal tersebut berarti dasar dari penyusunan program yang ada di LKM berdasarkan pada pasar yang tersedia di masyarakat. Dalam hal ini secara tidak langsung LKM menerapkan pendekatan *zero based budgeting*. Dimana program yang disusun bukan merupakan *feedback* dari tahun sebelumnya melainkan kondisi terkini yang sedang terjadi.

Menurut Andini (2020) *Zero Based Budgeting* (ZBB) merupakan metode penganggaran yang berdasar pada perkiraan setiap kegiatannya tidak mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan diperiode sebelumnya (dimulai dari nol), sehingga setiap alokasi yang disusun berdasarkan pada visi dan juga rencana program pada saat itu. Dengan menggunakan *zero based budgeting* (ZBB) maka informasi yang diberikan menjadi lebih rinci dan bermanfaat bagi manajemen serta setiap aktivitas dari program yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi apabila terdapat penyimpangan dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga menjadi lebih efektif dan tepat waktu serta dapat membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan

yang lebih tepat bagi peningkatan kinerja organisasi (Amanda et al., 2020). Penggunaan *zero based budgeting* ini tepat digunakan oleh LKM dikarenakan LKM Bina Sejahtera bergerak mengikuti dinamika terkini dan tidak berdasarkan pada *feedback* tahun sebelumnya.

LKM Bina Sejahtera memiliki program berupa simpanan dan pembiayaan. Program tersebut diperkenalkan kepada masyarakat desa melalui sosialisasi yang dibantu oleh pemerintah desa dalam pelaksanaannya. LKM Bina Sejahtera mendapat sambutan hangat dari masyarakat sehingga program-program yang ada pada LKM bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Dari data yang peneliti peroleh jumlah mitra LKM Bina Sejahtera sampai dengan bulan April 2022 berjumlah 112 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah mitra pada bulan April 2021 hanya berjumlah 9 mitra. Peningkatan jumlah mitra yang cukup tinggi menandakan bahwa keberadaan LKM Bina Sejahtera semakin eksis dan dipercaya oleh masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa LKM Bina Sejahtera berhasil dalam menyusun strategi organisasinya.

b. Penyusunan Anggaran

Menyusun anggaran merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan organisasi agar aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan. Modal awal yang dimiliki oleh LKM Bina Sejahtera berasal dari dana desa. Dana tersebut sepenuhnya digunakan oleh LKM untuk memberikan permodalan dan kredit kepada masyarakat desa dengan batas atas pemberian kredit sebesar Rp 15 juta perbulan. Sedangkan untuk biaya operasional LKM sendiri didapatkan dari pendapatan atau dana keuntungan yang diperoleh LKM dalam menjalankan usahanya.

LKM mendapatkan suntikan dana dari desa setiap tahunnya. Mekanisme penerimaan dana tersebut dilakukan melalui pengajuan proposal yang diajukan oleh pihak BUMDes kepada desa. Ketika LKM membutuhkan tambahan modal maka pihak BUMDes akan mengajukan proposal tambahan modal kepada desa. Sedangkan untuk kegiatan operasional LKM berasal dari pendapatan LKM.

Selain untuk operasional, pendapatan yang diperoleh LKM akan diberikan kepada

desa sebagai hasil usaha dari BUMDes atau biasa disebut dengan Pendapatan Asli Desa (PAD). Besar PAD yakni 40% dari hasil usaha BUMDes secara keseluruhan, dimana 15% penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial-budaya, bantuan pendidikan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Sedangkan 60% sisanya merupakan laba ditahan untuk modal bagi usaha LKM dan BUMDes.

c. Pelaksanaan Program Kerja

LKM Bina Sejahtera merupakan lembaga keuangan yang masih sangat sederhana dimana hanya terdiri dari satu karyawan yakni manajer LKM saja. Pelaksanaan dari program-program yang ada di LKM sendiri dilakukan oleh manajer dengan di-*support* oleh ketua dan bendahara BUMDes. Pelaksanaan program yang ada di LKM seperti simpanan dan pembiayaan memiliki mekanisme tersendiri. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi masyarakat baik yang menabung maupun melakukan kredit yakni merupakan masyarakat yang berdomisili di Desa Kembang Kerang. Dengan menerapkan sistem kekeluargaan, LKM Bina Sejahtera memberikan pinjaman tanpa angunan dengan menjunjung tinggi rasa saling percaya antara pihak LKM dengan masyarakat.

Pembiayaan dengan akad murabahah yang dijalankan LKM sendiri memiliki mitra berjumlah 109 orang dengan pembelian rata-rata berupa alat elektronik dan kebutuhan rumah tangga. Dalam pembiayaan murabahah ini sendiri dibatasi jumlahnya maksimal yaitu sebesar Rp 5 juta dengan jangka waktu angsuran selama 6 bulan. Untuk penagihan kredit sendiri dilakukan perbulan dengan menghubungi yang bersangkutan 2 sampai 3 hari sebelum jatuh tempo. Jika angsuran belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo maka manajer LKM akan mendatangi rumah yang bersangkutan untuk menagih angsuran kreditnya, tetapi apabila belum bisa membayar maka akan diberikan waktu sampai dengan bulan berikutnya.

Sedangkan untuk simpanan dibagi menjadi 2 yaitu simpanan biasa dan simpanan berjangka. Simpanan biasa merupakan program LKM yang sempat ditunda karena kendala kredit macet dimana

dana LKM tidak stabil sehingga uang tabungan yang sudah diputar untuk program LKM yang lain tidak bisa dikembalikan sewaktu-waktu. Namun, pada tahun 2022 ini simpanan biasa kembali dijalankan oleh LKM dikarenakan kondisi keuangan LKM setelah menerapkan sistem bagi hasil jauh lebih baik. Jumlah mitra yang menabung di LKM untuk simpanan biasa berjumlah 45 orang.

Simpanan berjangka sudah dijalankan sejak tahun lalu yakni pada tahun 2021 dengan melihat target pasar yaitu sekolah-sekolah yang ada di Desa Kembang Kerang. Simpanan berjangka berupa tabungan sekolah ini LKM telah bermitra dengan 3 sekolah yang ada di Desa Kembang Kerang yang berhasil mengumpulkan dana hingga Rp 160 juta.

d. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pada LKM Bina Sejahtera, pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat pencapaian manajer/karyawan LKM dalam satu periode apakah program-program yang telah direncanakan sebagian besar terealisasi dengan baik atau tidak. Selain itu, pihak BUMDes akan menilai dengan melihat jumlah kredit macet dan bagaimana pembiayaan LKM berjalan. Dalam hal ini LKM Bina Sejahtera dikelola oleh manajer yang bertugas dalam setiap hal yang berkaitan dengan jalannya program LKM. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh BUMDes juga dilihat dari kemampuan manajer LKM dalam meng-*handle* setiap program yang berjalan. Jika manajer LKM tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak ada pemotongan komisi yang dilakukan pihak BUMDes karena gaji karyawan menggunakan sistem persentase. LKM Bina Sejahtera sendiri menggunakan sistem persentase untuk gaji karyawan sehingga besar kecilnya gaji karyawan bergantung dari kinerjanya sendiri dalam menjalankan LKM. Semakin baik kinerja yang dimiliki maka akan berdampak pada jumlah gaji karyawan itu sendiri.

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang membahas tentang sejauh mana suatu kegiatan/program tertentu telah dicapai dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan membandingkannya dengan standar

tujuan yang ingin dicapai. Dalam setiap periode LKM menyusun rencana kerja yang akan dijalankan. Rencana kerja tersebut dijadikan target yang harus dicapai dalam periode tersebut. LKM Bina Sejahtera akan melakukan evaluasi kerja yang dilaksanakan melalui rapat akhir (bulan/tahun) bersama pihak BUMDes. Evaluasi kerja yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali biasanya membahas tentang kendala/masalah yang dihadapi dalam menjalankan program atau rencana kerja yang telah disusun sebelumnya ataupun membahas tentang program maupun rencana kerja yang harus dilakukan dalam waktu dekat.

Sedangkan evaluasi kerja yang dilaksanakan setiap akhir tahun biasanya dilakukan untuk membahas pencapaian dari program-program ataupun rencana kerja LKM secara khusus dan BUMDes secara umum apakah sudah mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak serta dilakukannya penyusunan rencana kerja untuk tahun berikutnya. Namun bila target tidak tercapai, tidak ada konsekuensi terhadap pegawai seperti pemotongan komisi atau yang lainnya karena LKM sendiri menerapkan sistem persentase dalam penggajian sehingga gaji yang diterima oleh pegawai LKM sesuai dengan kinerja yang dicapai pada periode tersebut.

2. Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Bina Sejahtera

a. Penggunaan Informasi Akuntansi pada Lembaga Keuangan Mikro Bina Sejahtera

Penggunaan akuntansi pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bina Sejahtera berperan penting dalam pengelolaannya. Pencatatan setiap transaksi yang terjadi membantu LKM untuk mengetahui perputaran uang (*cashflow*). Pembukuan akuntansi seperti pencatatan kas harian membantu pihak LKM untuk mengetahui jumlah kas masuk dan keluarnya setiap bulan. Dengan adanya pencatatan transaksi tersebut maka akan memudahkan LKM dalam penyusunan laporan keuangan.

LKM Bina Sejahtera menggunakan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan yang telah disusun. Diketahui pada tahun 2021 jumlah modal dan putaran aset mencapai jumlah Rp 100 juta dengan

jumlah laba yang diterima mencapai Rp 9 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa LKM Bina Sejahtera sangat memanfaatkan penggunaan informasi akuntansi dalam kegiatan usahanya.

b. Peran Informasi Akuntansi dalam Pengendalian Lembaga Keuangan Mikro Bina Sejahtera

Informasi akuntansi memiliki peran penting dalam perjalanan usaha LKM Bina Sejahtera. Informasi tersebut membantu LKM dalam perencanaan dan pengambilan keputusan usaha. Informasi akuntansi memiliki peran dalam membantu LKM mengetahui sejauh mana perkembangan usahanya dan alur keuangannya. Adanya informasi akuntansi khususnya laporan keuangan sangat membantu LKM dalam mengetahui jumlah pendapatan setiap bulannya serta digunakan untuk mengetahui perputaran uang (*cashflow*) sehingga keuangan LKM dapat diatur dengan baik. Selain itu, informasi akuntansi membantu LKM untuk melakukan evaluasi kerja apakah target mereka sudah tercapai atau tidak. Dengan melakukan evaluasi tersebut, LKM Bina Sejahtera dapat mengukur sejauh mana kinerja mereka.

3. Pembahasan

LKM Bina Sejahtera sangat memanfaatkan penggunaan informasi akuntansi seperti kas harian yang berisikan informasi mengenai kas masuk dan kas keluar LKM, laporan keuangan LKM, daftar jumlah mitra serta dokumen keuangan lainnya sangat berperan penting dalam pengelolaan LKM. Informasi akuntansi ini sangat berperan mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan organisasi. Selain itu informasi akuntansi juga digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan terkini organisasi sehingga LKM dapat mengatur keuangannya dengan baik. Informasi akuntansi juga dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam proses pengendalian manajemen seperti perencanaan strategi, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan, serta evaluasi kinerja LKM. Namun, penyusunan anggaran yang dilakukan oleh LKM Bina Sejahtera masih sangat sederhana dan pelaksanaan setiap hal yang ada di LKM masih dikerjakan oleh manajer LKM sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian manajemen pada LKM

Bina Sejahtera ini sudah baik tetapi masih belum sempurna.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rianto & Hidayatulloh (2020) yang menyatakan bahwa dengan menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis sangat bermanfaat dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi usaha. Sehingga dengan adanya informasi akuntansi tersebut, maka semua kegiatan usaha dapat dikelola dengan baik yang dimana juga akan menunjang keberhasilan usaha.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khonadakar & Fahim (2014) yang menyatakan bahwa informasi akuntansi melakukan peran penting pada keputusan manajemen dan kinerja organisasi yang telah terbukti menjadi kekuatan utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini dicapai dengan menerapkan konsep dasar akuntansi terbaik yang sesuai untuk setiap perusahaan. Studi ini juga menunjukkan bahwa informasi akuntansi memainkan peran penting dalam mengambil keputusan strategis yang efektif, akurat dan signifikan.

PENUTUP

Informasi akuntansi memiliki peranan penting dalam pengendalian LKM Bina Sejahtera. Hal tersebut terbukti dari pencapaian LKM Bina Sejahtera dalam mencapai target dan berjalannya program-program yang telah disusun dengan baik dimana LKM selalu menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan dalam proses pengendalian manajemen seperti perencanaan strategi, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan, serta evaluasi kinerja LKM. Informasi akuntansi juga membantu LKM untuk mengetahui kondisi keuangannya seperti jumlah tabungan, kredit, arus kas masuk dan keluar, serta jumlah pendapatannya setiap bulan. Dengan adanya informasi akuntansi maka LKM dapat mengatur keuangannya dengan baik. Informasi akuntansi membantu LKM dalam memantau perkembangan usahanya.

Namun, pada penelitian ini sistem pengendalian manajemen yang diterapkan belum ideal, sebagai saran penelitian maka peneliti memberi saran untuk melakukan penyusunan anggaran yang lebih jelas dan

sterperinci untuk periode-periode selanjutnya agar mempunyai gambaran keuangan serta target pendapatan yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan usaha sehingga keuangan LKM Bina Sejahtera dapat terkontrol dengan baik.

Berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, peneliti berharap LKM Bina Sejahtera dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Terutama berkaitan dengan penulisan posisi akun-akun dalam laporan keuangan, hal tersebut harus lebih diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, bagi pemerintah atau lembaga terkait agar memberikan edukasi pada setiap seperti BUMDes mengenai penyusunan serta pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku karena tidak semua lembaga/organisasi tersebut memiliki pengetahuan tentang akuntansi.

Lembaga Keuangan Mikro BUMDes Bina Sejahtera merupakan lembaga yang masih sangat sederhana sehingga banyak aturan ataupun ketentuan yang tidak memiliki dokumen tertulis sehingga peneliti sedikit kesulitan dalam melakukan triangulasi penulisan hasil penelitian. Peneliti menyarankan kepada pihak BUMDes maupun LKM Bina Sejahtera untuk membuat aturan maupun ketentuan yang tertulis sehingga aturan maupun ketentuan tersebut lebih meyakinkan dan lebih terstruktur serta menjadi aturan atau ketentuan yang lebih baku.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan dan menggali lebih dalam lagi terkait peran informasi akuntansi dalam sistem pengendalian manajemen suatu organisasi agar menjadi informasi yang lebih lengkap bagi informan yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 4(2), 114–118.
- Amanda, T. Y., Widayanti, A., & Yuniar, I. (2020). Aplikasi Perencanaan dan Realisasi Anggaran Kas Menggunakan Pendekatan Metode Zero Based Budget di Perusahaan Jasa (Studi Kasus di Bimbingan Belajar Neutron Bandung 2, Bandung). *E-Proceeding of Applied*

- Science*, 6(2), 3685–3695.
- Andini, M. S. (2020). Overview “ New Normal ” Kebijakan Belanja Negara melalui Zero Based Budgeting. *Buletin APBN*, 5, 12.
- Harian Jogja. (2018). *Dana LKM Desa Giripeni Diduga Bermasalah*. Yogyakarta.Bpk.Go.Id. <https://yogyakarta.bpk.go.id/dana-lkm-desa-giripeni-diduga-bermasalah/>
- Khonadakar, J. A., & Fahim, S. T. (2014). Role of Accounting Information in Strategic Decision Making in Manufacturing Industries in Bangladesh. *Global Journal of Management and Business Research: D Accounting and Auditing*, 14(1), 8–22.
- Mastura, M., Sumarni, M., & Eliza, Z. (2019). Peranan Infomasi Akuntansi terhadap Keberhasilan UMKM di Kota Langsa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 20–33.
- Mulyani, A. S. (2018). Manfaat Informasi Akuntansi Dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Ecodemica*, 2(1), 102–108.
- Nettiary, B. (2020). Peran Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus: Kafe di Palembang). *Ilmiah Manajemen*, 09, 1–10.
- Ojk.go.id. (2017). *Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro*. [http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Informasi-Umum-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx#:~:text=Lembaga Keuangan Mikro \(LKM\) adalah,jasa konsultasi pengembangan usaha yang](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Informasi-Umum-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx#:~:text=Lembaga%20Keuangan%20Mikro%20(LKM)%20adalah,jasa%20konsultasi%20pengembangan%20usaha%20yang)
- Pradana, A. A. (2019). Praktik Akuntansi dan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Artha Nugraha Getasan. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 10(2), 121–129.
- Prasetio, G., Ristiani, D., & Anggraeni, P. (2020). *Analisis atas Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Pemberian Kredit pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Bandung Kidul*. 11, 8–15.
- Putri, G. A. M. S., Wahyuni, M. A., & Sinarwati, N. K. (2017). Peranan sistem informasi dalam pengambilan keputusan bagi manajemen pada KPN Werdhi Yasa Kecamatan Buleleng. *E-Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1–9.
- Rianto, D., & Hidayatulloh, A. (2020). Penggunaan Informasi Akuntansi dan Umur Usaha Mendorong Keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Batik di Kota Yogyakarta. *Manajemen Dan Bisnis*, 12(2).
- Rudini, Nurhayati, & Afriyanto. (2014). *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin Di Desa Langkitin*. 283.
- Serangkab.go.id. (2021). *PT LKM Ciomas Meminta Bantuan Pendampingan kepada Inspektorat terkait Kredit Macet Nasabah*. Serangkab.Go.Id. <https://serangkab.go.id/detail/pt-lkm-ciomas-meminta-bantuan-pendampingan-kepada-inspektorat-terkait-kredit-macet-nasabah>
- Shifa, I. N. L., & Ilyas, I. (2021). Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa. *Jendela PLS*, 5(2), 76–87. <https://doi.org/10.37058/jpls.v5i2.2705>
- Suryantara, A. B., Sukoharsono, E. G., & Prihatiningtyas, Y. W. (2017). *The Wiyase Accounting in the Sine be Tradition: Potrait of Accounting Controls in a Nonprofit Organizations*.
- Uhise, J. R. (2013). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Penyaluran Kredit pada BRI Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 680–690.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, (2014).
- Waseso, R. (2021). *Sebanyak 35% BUMDes di Indonesia terdampak pandemi Covid-19*. Kontan.Co.Id. <https://amp.kontan.co.id/news/sebanyak-35-bumdes-di-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>

